

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arenawati. (2014). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djohani, R. (2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Ismawan, I. (2002). *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*. Solo: Klodran Indah.
- Mulyani, S. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahn Desa..* Jakarta: Erlangga.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pambudi, H. (2003). *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Pristiyanto, Djuni. (2015). *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta: Yayasan Penabulu

Sadu Wasistiono, D. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Widarta. (2001). *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.

Widjaja. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

#### **Sumber Jurnal :**

Apandi, A. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 713.

Dodi Eko Wijayanto. (2013). Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 44

Emi Hariyati. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1918

Hermansyah. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan. *Jurnal Pemerintahan Integratif* , 352-353.

Imanuel, F. C. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 1184.

Innesa Destifani. (2015). Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1241

Muhammad Amin Cakrawijaya, d. (2014). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* , 140.

Muhammad Amin Cakrawijaya, d. (2014). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* , 139.

Muryusna. (2014). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu) Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* , 101.

Mustikawati. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten. *Jurnal Administrasi Negara* , 2743.

Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintahan Integratif* , 110.

Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP*, 49

Yonatan, d. (2014). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. *Jurnal Administrative Reform* , 541.

**Sumber Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah

Naskah Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa